

LAPORAN BULAN JULI 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Juli tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 4 Agustus 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN AGUSTUS 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Agustus tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 1 September 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN SEPTEMBER 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan September tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 Oktober 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN OKTOBER 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Oktober tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 6 November 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN NOVEMBER 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan November tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 3 Desember 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM

LAPORAN BULAN DESEMBER 2023
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) BTKLPP KELAS I BATAM

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Permenkes No. 78 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
- Permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI

2. PELAKSANAAN

- Dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka BTKLPP KELAS I BATAM telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Penanganan pengaduan masyarakat secara umum bermanfaat untuk mengetahui masalah dan kekurangan di organisasi dari sudut pandang masyarakat/Pencari Keadilan. penegakan jalannya birokrasi yang bersih dan melayani di BTKLPP KELAS I BATAM. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, proses hingga hasil akhir berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan.
- Berdasarkan rekaman data dan informasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat untuk bulan Desember tahun 2023 belum ada pengaduan yang masuk.

3. PENUTUP

- Tidak terdapat laporan terkait WBS ke BTKLPP Kelas I Batam

Batam, 29 Desember 2023
Ketua Sub Tim
Whistleblowing System (WBS)



Silfy Tiffani, S.KM